

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH
SEMPADAN SUNGAI JENEBERANG
DI KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
YUSRA HIDAYAT RASYID
E121 13 507**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH
SEMPADAN SUNGAI JENEBERANG DI KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**

Yang diajukan oleh :

YUSRA HIDAYAT RASYID

E 121 13 507

Telah dipertahankan didepan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 5 Oktober 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

Pembimbing II



A. Lukman Iwan, S.Ip. M.Si
NIP.19790106 200501 1 001

Mengetahui,

**Ketua Departemen Ilmu Politik
dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 198702 2 001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH
SEMPADAN SUNGAI JENEBERANG DI KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Yusra Hidayat Rasyid

E121 13 507

Telah diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 05 Oktober 2017

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Nurlinah, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Ridha dan Karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan segenap rangkaian proses penelitian, penulisan dan penyusunan Skripsi ini. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai apresiasi atas perjuangan beliau dalam membawa umat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang. Beliau pula utusan Allah yang dimuliakan atas segala perilaku dan tindakannya yang telah menjadi contoh atau suri tauladan yang baik untuk kita semua.

Penulisan Skripsi dengan judul ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH SEMPADAN SUNGAI JENEBERANG DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA”***. Merupakan tugas akhir sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui dan menggambarkan Pelaksanaan penataan ruang khususnya

di kawasan sempadan sungai jeneberang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua saya , Ibunda **SUNARSIH** dan Ayahanda **ABD RASYID TAHA** yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya baik itu dukungan moral maupun secara finansial dalam kelancaran studi penulis. Terima kasih atas jasa-jasa dalam perjuangannya mendidik dan membesarkan penulis, Berkat kekuatan doa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan serta. Semoga mereka diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT, serta memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pegawai dilingkup fakultas.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas dan selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas dan seluruh staf.
5. Bapak A. Lukman Irwan S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Drs. Abdul Salam Muchtar sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, Ibu Dr. Hj Nurlinah, M.Si , Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Rahmatullah, M.Si. terima kasih atas masukan dan arahnya.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA., Bapak Dr. H. Rasyid Thaha,

M.Si., Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Dr. Hasrat Arief Saleh, MS., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Drs. Abd. Salam Muchtar, Bapak Dr. H. Suhardiman S., S. Sos, M.Si., Bapak Dr. Mulyadi, M.Si., dan dosen lainnya terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh informan penulis di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya, yakni di Kantor Bappeda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Kantor Satpol PP, Kantor Camat Somba Opu, Kantor Kelurahan Sungguminasa, Kantor Kelurahan Tompobalang, Kantor Kelurahan Pandang-pandang, Rt/Rw sungguminasa, Rt/Rw Tompobalang, Rt/Rw Pandang-pandang., Masyarakat yang menempati kawasan sempadan sungai yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis dan memfasilitasi penulis untuk mendapatkan data, informasi, dan melakukan wawancara.
11. Kepada kakak dan adik saya yakni Kakak Nurul Zuraidah Rasyid, Kakak Julia Zuraya Rasyid, Kakak Sri Sundari Rasyid, Adik Ainun Ratifah Rasyid, Adik Aira, Kakak Suandi, Kakak Abdi Syukur.

12. Kepada segenap sepupu-sepupu cunek penulis yakni kak Fath Hidayah, Kak Dila, Kak Ikka, Kak Ari, Kak Fildzah, Kak Imam, Adik ain, Adik nining, Adik egit, Adik Lintar, Adik key, yang juga tidak hentinya memberi semangat, beserta seluruh lingkup keluarga besar penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Dg. Lurang, Dg. Ronrong, Dg. Ma'ga, Dg. Temba', Hardian, onde', lalli', Jamal, samsul.
14. Saudara-saudari *Lebensraum*, yaitu Aksan, Zul, Afni, Dede, Yani, Fitri, Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Eki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Oskar, Cana, Fahril, ika, Syarif, Babba, Juwita, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Sundari, Iva, Uni, Tami, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Amel dan Almh lis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama kalian akan tetap diingatan.
15. Segenap organisasi kemahasiswaan HIMAPEM FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan.

16. Tim Supervisor KKN Gel 93 tahun 2016 Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla, M.Si dan Ibu Ir. Hj. St. Rohani yang setia membimbing dan mandampingi penulis selama KKN di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

17. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Pangkep Kecamatan labakkang, khususnya teman seposko di Desa Bontoa selama kurang lebih 2 bulan bersama-sama menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu: Nawawi, Ari, Afni, Vika, Tika, Fitri, Chatun, Muti. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 13 April 2017

Yusra Hidayat Rasyid

E121 13 507

DAFTAR ISI

Sampul	I
Lembar Pengesahan	li
Lembar Penerimaan	lii
Kata Pengantar	lv
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	Xiii
Daftar Gambar	Xiv
Abstrak	Xv
Intisari	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi	9
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan	13
2.3 Tinjauan Tentang Tata Ruang	16
2.3.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang Dan Pentaaan Ruang	16
2.3.2 Asas Dan Tujuan Penataan Ruang	17
2.3.3 Tugas Dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan	21
Daerah Dalam Penataan Ruag	
2.3 Tinjauan Konsep Penataan Ruang Sempadan Sungai	22
2.4 Kerangka Konsep	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.2 Tipe Peneitian	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1 Wawancara	28
3.3.2 Observasi	28
3.3.3 Dokumen Dan Arsip	29
3.4 Informan Penelitan	29
3.5 Jenis Data Penelitian	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.2 Data Sekunder	31
3.6 Definisi Operasional	31
3.7 Analisis Data	32
 BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	 33
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa	33
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa	33
4.1.2 Kondisi Geografis Wilayah	42
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu	48
4.2.1 Kondisi Geografis Wilayah	48
4.3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa	51
4.3.1 Visi Misi Dinas Pekrjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa	51
4.3.2 Struktur Organisasi	53
4.3.3 Kepegawaian	55

4.4 Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	57
4.4.1 Komunikasi	60
4.4.2 Sumber Daya	64
4.4.3 Sikap Para Pelaksana	68
4.4.4 Struktur Birokrasi	72
4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kawasan Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.	74
4.5.1 Faktor Pendukung	74
4.5.2 Faktor Penghambat	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 s/d 1957	37
Tabel 4.2	Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang	41
Tabel 4.3	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, Pertengahan Tahun 2015	44
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa	47
Tabel 4.2.1	Pembagian Luas Wilayah Kelurahan Kecamatan Somba Opu Kabupeten Gowa	49
Tabel 4.2.2	Jumlah Penduduk dan jenis kelamin menurut desa dan kelurahan di kecamatan somba Opu 2015	50
Tabel 4.3.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Bidang Tata Ruang Kabupaten Gowa	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kawasan Sempadan Sungai	24
Gambar 4.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Gowa	43
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa	55
Gambar 4.4.1	Daerah aliran sungai jeneberang di kecamatan somba opu	58

ABSTRAK

Yusra Hidayat Rasyid NIM E12113507. Government Science, Department Of Politc and Goverment, Faculty of Social And Politic, University of Hasanuddin. Preparing a thesis with the title Implementation of Spatial Planning Area Policy Jeneberang River In Somba Opu District Of Gowa Regency, under the guidance of Mr. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si as mentor I and Mr A. Lukman Irwan, S.Ip. M.Si as mentor II.

This study aims to determine the implementation of spatial planning policy in the jeneberang river border in Somba Opu District Gowa Regency, as well as the factors that influence it. To achieve these objectives, used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique.

Based on the results of research, the government has issued a policy in the form of regional regulation Gowa No. 15 of 2012 on the spatial plan of Gowa Regency 2012-2023 to divide gowa regency to several areas. Particular in the border area of the river jeneberang in terms of its implementation has not been implemented properly. The factors that influence the implementation of spatial planning policy especially in the jeneberang river border area is the coordination between government agencies, lack of supervision, and zonation factors that aim to facilitate the implementation process that has been planned in each region.

INTISARI

Yusra Hidayat Rasyid, Nomor Induk E12113507, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak A. Lukman Irwan, S.Ip. M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa 2012-2023 untuk membagi kabupaten gowa kebeberapa kawasan. Terkhusus di kawasan sempadan sungai jeneberang dalam hal pengimplementasiannya belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang khususnya di kawasan sempadan sungai jeneberang yaitu koordnasi antar instansi pemerintahan, kurangnya pengawasan, dan faktor zonasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengimplementasian yang telah di rencanakan di setiap kawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan berkaitan bumi, air dan tanah beserta isinya yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Untuk itu diperlukan pembangunan yang memanfaatkan bumi, air dan tanah beserta kekayaan alamnya tersebut dengan tetap mempertahankan layaknya pembangunan tersebut untuk lingkungan. sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. hal ini menjelaskan bahwa selain memiliki kewajiban dalam mensejahterakan rakyatnya negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi, air dan tanah beserta isinya.

Wewenang pemerintah dalam penataan ruang yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 Penataan Ruang , pasal 8 yang menyatakan bahwa :

- (1) penyelenggaraan penataan ruang
- (2) Pelaksanaan Penataan ruang
- (3) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.

penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang meliputi pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri yakni kewenangan dalam menentukan kebijakan pemerintahan diberbagai bidang termasuk didalam penataan ruang, hal ini juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 5 ayat (3) yang mengatur penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang nasional, penataan wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten kota.

Pada Pasal 4 peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat di jelaskan bahwa sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Garis sempadan sungai

¹ Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. 2014, *pengantar hukum tata ruang*, Jakarta: Prenadamedia group, hlm 114

bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan, pemerintah kabupaten gowa telah memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai. Arahan peraturan pengendalian pemanfaatan ruang di jelaskan dalam Pasal 79 peraturan daerah kabupaten gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang pengendalian pemanfaatan sempadan sungai meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang system prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai

sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Sungai Jeneberang merupakan sungai besar dan yang hulunya dari bagian timur Gunung Bawakaraeng (2,833 mdpl) dan Gunung Lampobattang (2,876 mdpl) yang kemudian menuju hilirnya di Selat Makassar.. Pada Daerah Aliran Sungai Jeneberang, terdapat dua daerah penampungan air (reservoir) utama yaitu di Kota Bili - bili dan Je'nelata. ² daerah aliran sungai jeneberang melewati delapan kecamatan di Gowa

² Dikutip Melalui (https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/sungai_fahmi.pdf) diakses pada tanggal 11/26/2016

(Tinggimoncong, Parigi, Parangloe, Manuju, Bontomarannu, Pallangga, Sombaopu, Barombong).

Gangguan pada sempadan yang merupakan kawasan lindung dari sungai tersebut. gangguan di sempadan seperti pemanfaatan lahan untuk permukiman dan juga tempat membuang sampah, akan menimbulkan permasalahan seperti hilangnya kawasan lindung sabuk hijau. Sabuk hijau merupakan penghijauan yang ditanami pepohonan yang ditata dan dirancang sesuai fungsi ekologiannya sebagai pengendali tata air, pencegah erosi, sebagai paru-paru lingkungan, fungsi fisiknya sebagai peneduh untuk menciptakan kesejukan lingkungan, serta fungsi estetisnya untuk menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan. Pada sabuk hijau yang terletak di daerah sempadan sungai disyaratkan tidak diperbolehkan ada bangunan (gedung) permanen, semi permanen, dan non permanen.

Pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, umumnya mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu masyarakat yang menempati bantaran sungai, umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai. Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam

kehidupan. Manfaat sungai antara lain adalah sebagai tempat budidaya ikan, drainase makro kota, tempat rekreasi, pengairan, sumber air baku bagi PDAM. Akan tetapi keberadaan sungai tersebut akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan pengendalian serta pengawasan pembangunan pada sempadan sungai dan badan sungai karena dapat menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai, bahkan bisa menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti banjir, erosi, sedimentasi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan di dukung oleh berbagai informasi, bahwa penyelenggaraan penataan ruang di sempadan sungai jeneberang belum optimal, dengan adanya rumah kumuh di sepanjang bantaran sungai, banyaknya sampah di sekitaran bantaran sungai dan pembobolan tanggul yang dimana mengubah fungsi tanggul sebagai pengendali banjir. Dengan peraturan daerah yang di dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten gowa tentang penataan ruang Khususnya di kawasan sempadan sungai . Oleh karena itu penulis mengangkat judul “**Implementasi kebijakan penataan ruang wilayah sempadan sungai jeneberang di kecamatan somba opu kabupaten gowa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 khususnya kawasan sempadan sungai jeneberang di kecamatan somba opu kabupaten gowa ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang di kecamatan somba opu kabupaten gowa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang di kecamatan somba opu kabupaten gowa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang di kecamatan somba opu kabupaten gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang di harapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pelaksanaan penataan ruang kawasan sempadan sungai jeneberang.

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan evaluasi pemerintah dalam mengimplementasikan kawasan sempadan sungai jeneberang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam. sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini sekaligus sebagai pendukung atau landasan teori dalam penelitian untuk menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

2.1 Tinjauan tentang Implementasi

Perhatian terhadap masalah implementasi dilator belakang oleh suatu kenyataan dimana terdapat penerapan kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional ternyata tidak atau kurang mencapai sasaran sebagaimana mestinya. Syukur Abdullah mengemukakan bahwa :

“Dalam studi organisasi dan management juga dikemukakan kurang berimbang yang diberikan pada segi perencanaan dan implementasi.”³

Hal ini menandakan bahwa studi implementasi merupakan hal baru, dimana belum dilengkapi dengan peralatan analisa dan metode pengambilan keputusan yang maju.

³ Syukur Abdullah, 1985, *Birokrasi dan Pembangunan Nasional: Studi tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program Pembangunan di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.

Implementasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (The Policy Implementation Process, 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solichin mengemukakan pengertian implementasi sebagai berikut : *"Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."*⁴

George C. Edward III mengemukakan Terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap para pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka

⁴ Abdul Wahab solichin , Op Cit, halaman 64.

kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Kedua, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Ketiga, variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi biasa. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

Keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa implementasi adalah aspek operasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di atas pula dapat disimpulkan bahwa dalam proses

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak seperti yang di kemukakan oleh Adi Tarwiyah⁵, yaitu:

- a) Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan.
- b) Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Unsur pelaksana/implementor, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasaan dari proses implementasi tersebut.

2.2 Tinjauan tentang kebijakan

Kata Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu policy, Istilah kebijakan adalah sebuah system nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan actor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya tentang konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminology “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “statement of intens” atau perumusan keinginan.⁶

⁵ Adi Tarwiyah, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta ;11

⁶ Faried Ali Dan A. Syamsu Alam. 2011, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hal 7.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok, dan sektor swasta. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan),

kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.⁷

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan:

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”⁸

⁷ Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, halaman 15.

⁸ Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, halaman 7

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3 Tinjauan tentang tata ruang

2.3.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Selanjutnya struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1992) dalam Yunus Wahid (1992), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.⁹

⁹ A.M. Yunus Wahid . 1992, *peralihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang*. Makalah-lingkungan dan tata ruang, PPS UGM Yogyakarta, hlm 1.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah sususnan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya).

2.3.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Kebersamaan dan kemitraan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Tujuan Penataan ruang, ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang penataan ruang yang menyatakan bahwa :

- a. Mewujudkan wilayah nasional aman, situasi masyarakat yang dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- b. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- c. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- d. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat di pertahankan bahkan di tingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah Sumber daya alam tak terbarukan.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.

b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu samalain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Ridwan HR menjelaskan Tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu:

- a. police making, ialah penentuan haluan Negara.
- b. task executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

2.4 Tinjauan konsep penataan ruang sempadan sungai

Pasal 4 ayat 1 Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis

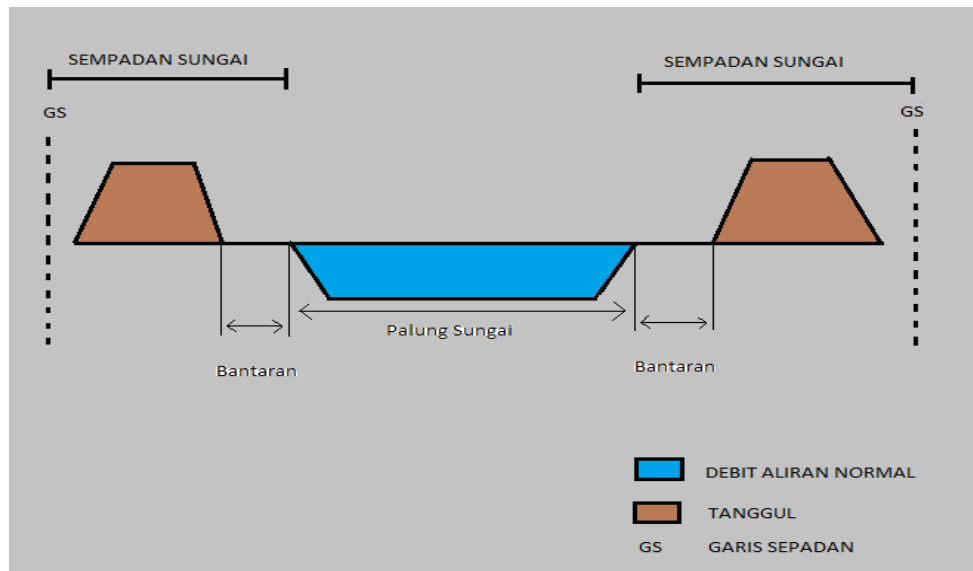
¹⁰ Ridwan HR.2006,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, Hal13.

sempadan sungai di jelaskan bahwa Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Pasal 7 Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 9 Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa, Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Gambar 2.1 : Kawasan Sempadan Sungai



Menurut Hening anggani (2005) Pemeliharaan bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang bermanfaat untuk menampung dan mengalirkan air sebagian dari aliran banjir. Dengan demikian segala macam penghalang seperti tanaman tanaman keras perlu ditebang dan tidak boleh ditanam kembali di bantaran. Lubang-lubang atau galian yang dekat dengan kaki tanggul perlu ditutup kembali setinggi bantaran agar tak membahayakan stabilitas tanggul. Galian saluran untuk keperluan drainase dibuat searah dengan arah aliran sungai.

Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang

menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang sempadan Sungai Je'neberang perlu dilakukan penelitian secara mendalam untuk itu peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi George C. Edward III .

2.5 Kerangka konsep

Pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai pengambil kebijakan telah menetapkan peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang yang di maksud disini merupakan kawasan sempadan sungai .Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai meliputi ketentuan umum peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan Indikasi arahan peraturan zonasi berisi Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan, Kegiatan yang diperbolehkan dengan persyaratan meliputi

kegiatan budi daya dan Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai.

Implementasi peraturan daerah tersebut merupakan tugas dan fungsi yang harus di jalankan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah kabupaten gowa. Pengimplementasian Perda tersebut di lapangan, untuk mewujudkan strategi penataan ruang wilayah yang termuat di dalamnya tentu tidak berjalan mulus dan sempurna. Berbagai hal bisa mempengaruhi, baik dari faktor penghambat yang memberi tantangan terhadap pengimplementasian maupun faktor pendukung yang mendorong dan mempunyai potensi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Bagan Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa tepatnya di kecamatan somba opu yang merupakan salah satu wilayah yang dilalui dari sungai jeneberang.

Waktu yang diperkirakan oleh penulis ialah selambat-lambatnya dua bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti. Penelitian ini berakhir apabila peneliti sudah merasa data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3.2 Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun

oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami dan menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana penataan ruang di kabupaten Gowa.

3.3 Teknik pengumpulan data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung informan yang berkaitan dan paham dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dan mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

3.3.3 Dokumen dan Arsip

Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

3.4 Informan penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat.

Informan penelitian di pilih secara purposive sampling yaitu teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang

diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan, baik dari aparaturnya pemerintah, maupun masyarakat secara luas yang dianggap representatif dan dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Kepala bidang tata ruang kabupaten gowa
- kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah (Satpol PP)
- sekretaris tompobalang, sekretaris pandang-pandang, lurah sungguminasa.
- Ketua Rt3 Rw 9 kelurahan tompobalang, ketua Rt 2 Rw 7 kelurahan pandang-pandang.
- Tokoh Masyarakat di wilayah kelurahan pandang-pandang.

3.5 Jenis data penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten

dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. atau instansi yang terkait dalam penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder ini merupakan data yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan penelitian hukum yang bersifat deskriptif.¹¹

3.6 Definisi operasional

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang di operasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Peraturan daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah kabupaten gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten gowa mengenai pemanfaatan ruang khususnya kawasan sempadan sungai.

¹¹ Soeryono Soekanto, 1982 .*Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta: Universitas Indonesia hlm52.

2. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai
3. Pengawasan adalah upaya mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai .
4. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.7 Analisis data

Data yang memperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai , analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan . data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data , proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang . Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu profil daerah wilayah Kabupaten Gowa serta hasil penelitian penulis:

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa.

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje'ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum'at untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton.

Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan

rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya.

Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin telah mengalami 36 kali pergantian Somba (raja) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 s/d 1957

No.	Nama Raja	Periode
1.	Tumanurung Bainea (Putri Ratu)	-
2.	Tamasalangga Baraya	1320 - 1345
3.	I Puang Loe Lembang	1345 - 1370
4.	I Tuniata Banri	1370 - 1395
5.	Karampang Ri Gowa	1395 - 1420
6.	Tunatangka Lopi	1420 - 1445
7.	Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna	1445 - 1460
8.	IPakereŕ Tau Tunijallo Ri Passukki	1460
9.	Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumapaŕisi Kallonna	1460 - 1510
10.	I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng.	1510 - 1546
11.	I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Dataŕ Tunibatta	1546 - 1565
12.	I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng	1565 (40 hari)

	Bontolangkasa Tunijallo.	
13.	I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa Tunipasulu Tumenanga Ri Butung.	1565 - 1590
14.	I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga Ri Gaukanna	1590 - 1593
15.	I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna.	1593 - 1639
16.	I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Ballapangka.	1639 - 1653
17.	I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu.	1653 - 1669
18.	I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara.	1669 - 1674
19.	I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro Bone Sultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung.	1674 - 1677
20.	La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng AnaŌ Moncong Sultan Ismail Tumenanga Ri	1677 - 1709

	Somba Opu.	
21.	I Mappauŕangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna.	1709 - 1711
22.	I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin Tumenanga Ri Jawaya.	1712 - 1724
23.	I Mappauŕangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna (Kedua kalinya)	1724 - 1729
24.	I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al Mansyur Tumenanga Ri Gowa.	1729 - 1735
25.	I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri Bontoparang.	1735 - 1742
26.	Amas Madina ÒBatara Gowa IIÓ Sultan Usman (diasingkan ke Sailon oleh Belanda)	1742 - 1753
27.	I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang.	1753 - 1767
28.	I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging.	1767 - 1769
29.	I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng Mangasa Sultan	1769 - 1778

	Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa.	
30.	I Mappatunru / I Manginyarang Krg Lembangparang Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka.	1778 - 1810
31.	La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril MuŌminin Tumenanga Ri Suangga	1825 - 1826
32.	I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna.	1826 - 1893
33.	I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tumenanga Ri KalaŌbiranna.	1893 - 1895
34.	I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Muhammad Husain Tumenanga Ri BunduŌna.	1895 - 1906
35.	I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga Tumenaga Ri Sungguminasa.	1906 - 1946
36.	Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya.	1946 - 1957

Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang

No	Nama Bupati	Periode
1.	Andi Idjo Karaeng Lalolang	1957 – 1960
2.	Andi Tau	1960 – 1967
3.	H. M. Yasin Limpo	Karetaker
4.	Andi Bachtiar	Kareteker
5.	K. S. Masoud	1967 – 1976
6.	H. Muhammad Arif Sirajuddin	1976 – 1984
7.	H. A. Kadir Dalle	1984 – 1989
8.	H. A. Azis Umar	1989 – 1994
9.	H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si	1994 – 2002
10.	Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si	2002 – 2004

11.	H. Andi Baso Machmud	Karetaker
12.	H. Ichsan Yasin Limpo, SH	2005-2015
13.	H. Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo, SH,.MH	2015 sampai sekarang

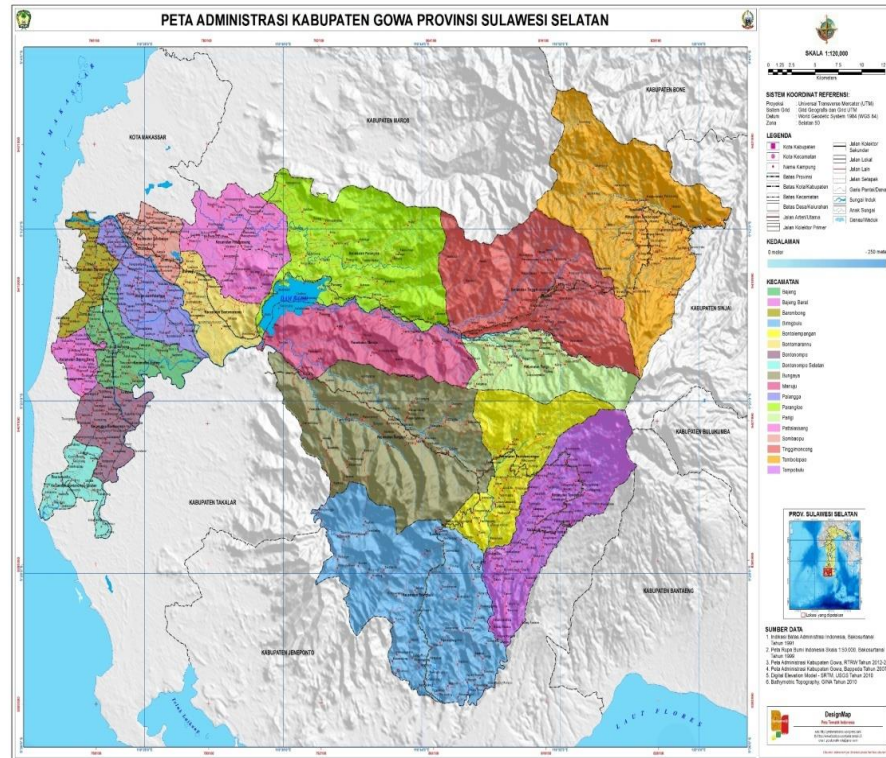
4.1.2 Kondisi Geografis Wilayah

a. Letak Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administratif Kabupaten Gowa



Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1,883.93 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.

Tabel 4.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, Pertengahan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah penduduk
1	BONTONOMPO	30.39	41.502
2	BONTONOMPO SELATAN	29.24	29.626
3	BAJENG	60.69	67.883
4	BAJENG BARAT	19.04	24.588
5	PALLANGGA	48.24	117.115
6	BAROMBONG	20.67	38.734
7	SOMBA OPU	28.09	157.448
8	BONTOMARANNU	52.63	34.453
9	PATTALLASSANG	84.96	23.752
10	PARANGLOE	221.26	18.118
11	MANUJU	91.90	14.852
12	TINGGIMONCONG	142.87	23.621
13	TOMBOLO PAO	251.82	28.850
14	PARIGI	132.76	12.797
15	BUNGAYA	175.53	16.269
16	BONTOLEMPANGAN	142.46	12.512
17	TOMPOBULU	132.54	28.748
18	BIRINGBULU	218.84	31.834
KABUPATEN GOWA		1,883.93	722.702

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Gowa.

Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa kecamatan tombolo pao yang luas wilayahnya 251.82 km^2 merupakan kecamatan terluas di kabupaten gowa dengan jumlah penduduk 28.850 orang , kecamatan bajeng barat yang luas wilayahnya 19.04 km^2 merupakan kecamatan tersempit di kabupaten gowa dengan jumlah penduduk 24.588 orang.

b. Hidrologi

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km^2 dengan panjang 90 km. Aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km^2 yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak $35.000.000 \text{ m}^3$ dan untuk pembangkit tenaga listrik

tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

c. Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

d. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2015 sebesar 722,702 jiwa, laki-laki berjumlah 355,381 jiwa dan perempuan sebanyak 367,321 jiwa.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa, Pertengahan Tahun 2015.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bontonompo	19.814	21.688	41.502
2	Bontonompo Selatan	14.237	15.389	29.626
3	Bajeng	33.547	34.336	67.883
4	Bajeng Barat	11.972	12.616	24.588
5	Pallangga	57.852	59.263	117.115
6	Barombong	19.128	19.606	38.734
7	Somba Opu	78.405	79.043	157.448
8	Bontomarannu	17.097	17.356	34.453
9	Pattallassang	11.885	11.867	23.752
10	Parangloe	8.847	9.271	18.118
11	Manuju	7.183	7.669	14.852
12	Tinggimoncong	11.693	11.928	23.621
13	Tombolo Pao	14.641	14.209	28.850
14	Parigi	6.020	6.777	12.797
15	Bungaya	7.827	8.442	16.269
16	Bontolempangan	5.911	6.601	12.512
17	Tompobulu	13.862	14.886	28.748
18	Biringbulu	15.460	16.374	31.834
Kabupaten Gowa		355.381	367.321	722.702

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Gowa

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kecamatan somba opu merupakan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten gowa sebesar 157.448 orang, dan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan bontolempangan sebesar 12.512 orang.

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu

4.2.1 Kondisi Geografis Wilayah

a. Letak Geografis

Kecamatan Somba Opu merupakan satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa yang letaknya berada di Ibukota Kabupaten dan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas kecamatan Somba Opu adalah 28,09 Km² atau 2.809 Ha. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Somba Opu, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar
- b. Sebelah Barat : Kota Makassar
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga (Sungai Jeneberang)
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu.

Kecamatan Somba Opu berada pada wilayah dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat geografis berada pada 5 derajat 12'5" LS dan 119 derajat 27'15" BT. Batas alam dengan kecamatan Palangga adalah sungai Jeneberang yaitu sungai dengan panjang 90 Km dan luas daerah aliran sungai 881 Km².

Dari Gambar 4.2 di atas daerah aliran sungai jeneberang melewati empat kelurahan yaitu kelurahan bontoramba, kelurahan tamarunang, kelurahan tompobalang, kelurahan sungguminasa, kelurahan pandang-pandang.

Tabel 4.2.1 : Pembagian Luas Wilayah Kelurahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

No	Kelurahan	Luas (KM) ²
1	Sungguminasa	1.46
2	Bonto-Bontoa	1.61
3	Batang Kaluku	1.30
4	Tompobalang	1.80
5	Katangka	1.36
6	Pandang-Pandang	1.55
7	Tombolo	2.06
8	Kalegowa	1.21
9	Samata	2.44
10	Romang Polong	3.71
11	Paccinongang	2.32
12	Tamarunang	2.16
13	Bontoramba	2.20
14	Mawang	2.99
Jumlah		28.09

Sumber Data : kecamatan somba opu 2012

Dari table di atas luas wilayah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa Kelurahan romang polong memiliki luas daerah terluas yaitu 3.71 KM², sedangkan kelurahan Kalegowa memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 1,21 KM².

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu pada tahun 2015 sebesar 157,448 jiwa, laki-laki berjumlah 78,405 jiwa dan perempuan sebanyak 79,043 jiwa.

Tabel 4.2.2 : Jumlah Penduduk dan jenis kelamin menurut desa dan kelurahan di kecamatan somba Opu 2015

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pandang – Pandang	4.315	4.421	8.736
2	Sungguminasa	4.182	4.576	8.758
3	Tompobalang	6.259	6.288	12.547
4	Batang Kaluku	7.900	7.900	15.800
5	Tamarunang	8.035	7.702	15.737
6	Bontoramba	2.061	2.116	4.177
7	Mawang	2.444	2.466	4.910
8	Romang Polong	3.931	3.979	7.910
9	Bonto – bontoa	7.228	7.394	14.622
10	Kalegoa	1.374	1.517	2.891
11	Katangka	5.690	5.691	11.381
12	Tombolo	8.669	8.809	17.478
13	Paccinongan	12.072	11.977	24.049
14	Samata	4.245	4.207	8.452

Kecamatan Somba Opu	78.405	79.043	157.448
---------------------	--------	--------	---------

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Gowa

Data pada tabel 4.4.2 menunjukkan bahwa di kecamatan somba opu jumlah penduduk terbanyak terdapat di kelurahan paccinongan sebesar 24.049 orang, dan jumlah penduduk terendah terdapat di kelurahan kalegowa sebesar 2.891 orang.

4.3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa

Salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi yang efektif, efisien dan proporsional yang diimplementasikan di Kabupaten Gowa dengan membentuk sebuah Unit kerja yang khusus menangani penataan ruang dan memberikan pelayanan Izin pemanfaatan Ruang.

4.3.1 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis , antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan

mengacu pada batasan tersebut, visi dinas pekerjaan umum kabupaten gowa dijabarkan sebagai berikut;

“Tersedianya infrastruktur PU yang handal dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat”.

Visi yang dirumuskan ini menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan di kembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa kedepan. Maka pokok yang terkandung dalm visi dinas pekerjaan umum tersebut antara lain :

1. Pelayanan professional, artinya adalah pelayanan umum yang di berikan oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan penempatan personil yang terpat dalam bidang dan tugas keahliannya.
2. Transparan, artinya merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang system pelayanan pemerintahan.
3. Akuntabel, mempunyai arti yang sangat mendalam, namun secara singkat dapat diartikan “ dapat di percaya” dan bertanggung jawab”.

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa mencanangkan misi. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintahan) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, di harapkan seluruh pengawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal dinas pekerjaan umum kabupaten gowa dan mengetahui alasan dan keberadaan dan perannya lebih dalam. Misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah di bidang jalan dan jembatan dalam mendukung pengembangan wilayah
2. Mengembangkan infrastruktur permukiman untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak huni
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan.
4. Menata ruang yang nyaman dan berkualitas
5. Mengembangkan kemampuan profesionalisme SDM serta penerapan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien.

4.3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekertaris, Terdiri dari :

- Subbagian Umum Dan Pegawaian
- Subbagian Program pelaporan dan jasa konstruksi
- Subbagian Keuangan

3. Bidang Bina Marga

- Seksi Pembagunan/peningkatan jalan
- Seksi Pembagunan/peningkatan jembatan
- Seksi Pemeriharan Jalanan Dan Jembatan

4. Bidang Cipta Karya

- Seksi Bangunan gedung
- Seksi penyidik air minum dan peningkatan kawasan permukiman
- Seksi pengelolaan air limbah dan sanitasi

5. Bidang Tata Ruang

- Seksi Perencanaan ruang
- Seksi Pemanfaatan ruang
- Seksi pengendalian Dn pemanfaatan ruang

6. Bidang operasional dan pengairan

- Seksi Penanggulangan banjir

- Seksi operasi jaringan irigasi
- Seksi pemeliharaan dan pengawasan

7. Bidang Teknik Dan Perencanaan

- Seksi Perencanaan Teknik Jalan Dan Jembatan
- Seksi Perencanaan Ujian Dan Pengendali Mutu
- Seksi Perencanaan kecipta karya dan sumber daya air

Gambar 4.3 : Sturktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa



4.3.3 Kepegawaian

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pekerjaan Umum di bidang tata ruang di dukung oleh 15 personil dengan komponen menurut tingkat pendidikan kepegawaian, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.1 : Tingkat Pendidikan Pegawai Bidang Tata Ruang Kabupaten

Gowa

No.	Golongan	Pendidikan formal							Total
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IV/e								0
2	IV/d								0
3	IV/c								0
4	IV/b								0
5	IV/a		1						1
Total Gol IV		0	1	0	0	0	0	0	1
6	III/d		1	1					2
7	III/c			2					2
8	III/b			6					6
9	III/a			1					1
Total Go III		0	1	10	0	0	0	0	11
10	II/d								0
11	II/c				1				1
12	II/b				1				1

13	II/a								0
Total Gol II		0	0	0	2	0	0	0	2
14	I/d								
15	I/c						1		
16	I/b								
17	I/a								
Total Gol I		0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL		0	2	10	2	0	1	0	15

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data pada tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa sumber daya manusia Bidang tata ruang Kabupaten Gowa berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan yang terbanyak yaitu S1 10 orang dan golongan yang terbanyak yaitu Golongan III/b 6 orang sedangkan yang terendah tingkat pendidikannya yaitu I/c 1 orang .

4.4 Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Daerah Aliran sungai jeneberang kabupaten gowa di kecamatan somba opu mencakup lima kelurahan di antaranya kelurahan bontoramba, kelurahan tamarunang, kelurahan tompobalang, kelurahan sungguminasa dan kelurahan pandang-

Gambar 4.4 : Daerah Aliran Sungai Jeneberang

a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH),

pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang system prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan

sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Dengan menggunakan indikator-indikator penentu berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan yang di kemukakan George C. Edward III George Terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap para pelaksana
4. Struktur Birokrasi

4.4.1 Komunikasi

Pemanfaatan ruang dan pengawasan tidak berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi. komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy Makers) kepada pelaksana kebijakan (Policy Implementors).

Di mana pemerintah Kabupaten Gowa memberikan tanggung jawab kepada dinas (institusi) yang terkait dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai. Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari suatu Peraturan Daerah

dari proses penyusunan sampai tahap pengesahan melalui serangkaian tahap-tahapan yang panjang sehingga tidak ada alasan bagi dinas (institusi) terkait untuk tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 .

Sesuai pernyataan dari Sekertaris Kecamatan Somba Opu Bapak Agus Salim, S.sos

“Sebelum perda di sah kan itu ada istilah pra perda, karna jangan sampai ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah tanpa masyarakat mengetahui. Alhamdulillah kita sudah sosialisasi di kecamatan dan kita sudah kordinasi dengan kelurahan bahwa setiap kelurahan harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang harus di patuhi oleh masyarakat sekitarnya.”(Wawancara 11 April 2017).

Sesuai pernyataan ketua Rt 02 Rw7 Kelurahan pandang-pandang bapak insan Dg. leo

“Pada tahun 2014 masyarakat di undang menghadiri sosialisasi tentang sempadan sungai di kantor lurah pandang-pandang.” (9 April 2017)

Sesuai pernyataan ketua Rt 3 Rw 9 Kelurahan tompobalang Ibu fatmawati

“beberapa bulan yang lalu diadakan pertemuan antara masyarakat bantaran sungai dengan pemerintah kelurahan tompobalang, tapi masih ada masyarakat yang melanggar. “ (9 April 2017)

Dari Hasil Wawancara pemerintah setempat telah memberika arahan kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan peruntukan dan pemanfaatan ruang yg dilarang di kawasan sempadan sungai dan dari hasil observasi masih ada masyarakat yang masih melanggar sampai saat ini.

a. Kejelasan Informasi

Kejelasan menghendaki agar Informasi yang jelas mudah di pahami, selain itu selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun dinas (institusi) yang terkait dalam Implementasi kebijakan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana teknis kebijakan yang menerjemahkan isi peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 Khususnya kawasan sempadan sungai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Sesuai pernyataan dari kepala bidang tata ruang Kabupaten Gowa Iryani jamaluddin ST, MT.

“Mengenai pengawasan ke bawah, kita sudah pasang papan Pengumuman di sekitar tanggul.”(3 April 2017).

Bedasarkan hasil di pengamatan di lapangan bahwa di kawasan sempadan sungai jeneberang khususnya di daerah kabupaten gowa telah terpasang papan pengumuman di setiap tanggul.

b. Konsisten Informasi

Konsisten menghendaki agar informasi yang di sampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok saran maupun dinas (institusi) yang terkait.

Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 di lakukan dengan mengkoordinasikan dengan camat, Lurah di wilayah administratif Kabupaten Gowa terutama dalam hal informasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan pernyataan sekertaris lurah tompobalang bapak Suhardiman Utama

“Pemerintahan kelurahan tompobalang sudah menegur secara lisan dan tulisan dan hampir tiap bulan kita sampaikan, kenapa lagi ada tambahan disini kita sudah sudah koordinasi dengan lingkungan, lingkungan juga tidak tahu menahu, sebelumnya sudah ada papan pengumuman di sekitaran bantaran sungai. ”
(Wawancara 18 April 2017)

Sesuai dengan pernyataan Lurah Sungguminasa Ibu Rahmawati Rahman

“Sudah berapa kalimi kita tegur masyarakat yang selalu membuang sampah di tanggul, tapi bagaimana tidak ada sekali kesadarannya, masalahnya juga karna dekat pasar sungguminasa jadi sampah dari pasar di buang di tanggul.”
(Wawancara 18 April 2017).

Sesuai dengan Pernyataan Sekertaris Lurah Padang-pandang Ibu Trisni Ridayana

“Beberapa tahun lalu sudah ada rapat dengan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dengan pihak balai pompengan

dengan dinas PU, tapi sampai saat ini masih ada yang bermukim dibantaran sungai, kita selalu kasih teguran tapi susahnyanya yang tinggal disitu purnawirawan jadi bagaimana caranya, Umpamanya kalo ada apa-apanya dari pemerintah setempat mau di gusur, yang jelas kita sudahmi di tanyak dilarang membangun.” (Wawancara 11 April 2017).

Dari Hasil Wawancara dapat dilihat sikap pelaksana mendukung sepenuhnya pengawasan pemanfaatan ruang di kasawan sempadan sungai, hal ini ditandai dengan keterlibatan kelurahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang,disisi lain masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang peraturan tersebut.

4.4.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan . sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sumber Daya merupakan faktor pendukung pelaksanaan penataan ruang di kawasan sempadan sungai. pelaksanaan penataan ruang di kawasan sempadan sungai membutuhkan sumber daya yang mampu menunjang pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tidak terhambat implementasinya. Sumber daya manusia ini meliputi Dinas (intitusi) yang terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupate Gowa.

Sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Gowa Iryani Jamaluddin ST, MT.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Mengenai pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang dari segi aturan memang tidak bisa ada bangunan liar di sepanjang kawasan sempadan. Mengenai penindakan langsung bukan kita, hanya saja menyurat ke bupati tentang

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan bupati diposisi ke satpol pp. (Wawancara 30 Maret 2017)

Selain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Penegakan Peraturan Daerah aparat Satpol PP juga ikut terlibat dalam pengawasan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

Sesuai dengan pernyataan kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Bapak Hasrun Halid menyatakan Bahwa :

“Pada dasarnya pelaksanaan kebijakannya balai pompgangan, jadi kita ini klo ada kasus klo pompgangan minta bantuan untuk penertibannya.” (Wawancara 31 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hubungan antar organisasi pemerintahan di Kabupaten Gowa masih kurang dalam pengawasan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang.

Selain itu pemahaman dinas (institusi) terkait mengenai pengimplementasian peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 masih kurang.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang di jelaskan Bahwa :

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pada Ayat 1 dan 2 Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 di jelaskan bahwa :

- 1) Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan

daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

4.4.3 Sikap Para Pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah sikap yang di tunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang di tunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subjek dan objek kebijakan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana) Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Sesuai dengan pernyataan Ketua Rt 02 Pandang-pandang menyatakan bahwa :

“Sebelumnya saya sudah melapor ke pompengan emi saylan, sampai disitu saya di arahkan ke pompengan baddoka, saya bilang kalo saya ke baddoka otomatis biaya dan waktu, ini kan hanya pelaporan tidak ada kepentingan saya alasannya bukan penyidik ternyata pompengan ada penyidik, jadi sampai disini saja pak yang penting kita tau bahwa kita yang punya lokasi itu, alangkah baiknya bisa di tata ulang. Sebelumnya saya sudah tau jalannya kapan saya ke pompengan baddoka, ujung-ujungnya ke pusat , biasanya klo begitu ada permainan,karna ada informasi saya dapat bahwa ada tim yang sudah lama di bentuk, dan itu tim katanya kena tanda kutip dapat gaji bulanan, otomatis mereka berfikir klo kita diam gaji berjalan, yg penting itu saya bebas , bukan karna tidak di masuk di tim panitia memang saya tahu kenapa saya tidak masuk dalam mungkin karna saya vokal atau bagaimana karna di

dalam tim orang-orang yg tertentu saja. Klo ada apa-apa di bawah saya tidak terlibat.” (Wawancara 9 April 2017).

Peran serta masyarakat Dalam Penataan Ruang merupakan salah satu faktor penting dalam guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang . Menurut Hardjasoemantri, Apabila tindakan-tindakan diambil untuk kepentingan masyarakat, dan apabila diharapkan untuk menerima dan patuh pada tindakan tersebut, maka harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya. Dengan kata lain, diperlukan adanya peran masyarakat.¹²

Pada Pasal 100 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Di tegaskan bahwa peran masyarakat dalam hal pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang

¹² Hardjasoemantri, Koesnadi, 2009, Op.cit, hlm.112-114.

- d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, bentuk peran serta dapat berupa usul, saran, pendapat, pertimbangan atau keberatan. Sesuai hasil wawancara Tokoh Masyarakat kawasan sempadan Sungai di kelurahan pandang-pandang

“Sebelumnya memang ada rapat dengan masyarakat bantaran sungai dengan aparat pemerintah kabupaten gowa dengan balai pompgangan , pada saat itu saya bertanya kepada aparat pemerintah kabupaten gowa dengan balai pompgangan tidak bisa menjawab , saya bertanya mulai hulu sampai hilir ada bantaran sungainya tapi kenapa bantaran terhenti di perumahan, saya juga jelaskan klo namanya bantaran sampai laut tapi kenapa ada perumahan permanen di kawasan bantaran sungai di perbatasan antara gowa dengan Makassar , apakah dia tidak tahu hukum atau tidak tahu fungsi bantaran. saya mengerti fungsi tanggul, saya mengerti fungsi bantaran memang saya melanggar Cuma klo mau menggusur, saya bongkar sendiri jangan di bongkar oleh aparat , hanya saya terakhir membongkar setelah di bongkar dari sungguminasa sampai perumahan, kenapa bantaran di stop sampai di perumahan ini, kenapa walikota mengeluarkan izin mendirikan bangunan, bahkan ini izin prinsip klo bangunan perumahan kayak begitu, apakah boleh orang kaya tidak melanggar dan orang miskin tidak melanggar.(wawancara 9 April 2017).

Dari Hasil Wawancara di atas sikap para pelaksana dinas (institusi) dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang kurang baik seakan- akan adanya diskriminasi antar masyarakat kawasan sempadan sungai di kecamatan somba opu dengan masyarakat di kawasan sempadan sungai di kota makasaar. dari sisi lain koordinasi antar sektor pemangku kepentingan tidak sejalan dengan tujuan dari rencana tata ruang nasional dan adanya kepentingan-kepentingan di dinas (institusi) tersebut dan berdampak dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang.

4.4.4 Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai Tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Struktur Birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam

struktur birokrasi dan adanya standard operating proceasures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implelementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Sesuai yang di utarakan Kepala Bidang Tata Ruang Iryani jamaluddin ST, MT.

“Mengenai pelaksaaan kebijakan Penataan ruang kawasan sempadan sungai, kita mengacu pada peraturan Nomor 15 Tahun 2012, mengenai pengendalian ke bawah ada seksi di bidang tata ruang yang turun langsung meninjau langsung terkait dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.”(Wawancara 3 April 2017)

Dalam mewujudkan tertib tata ruang, dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 di jelaskan bahwa “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten di lakukan melalui

ketentuan umum peraturan zonasi , ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Mengenai instansi yang terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Gowa telah menggambarkan struktur birokrasi yang baik akan tetapi menurut penulis bahwa seluruh instansi yang terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya di lihat dari pengamatan di lapangan masih banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai.

4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kawasan Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang yang dilakukan pemerintah daerah dan dinas (institusi) yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.5.1 Faktor Pendukung

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan peraturan teknis penetapan garis sempadan

sungai dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai.

2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Pelaksanaan kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dalam hal pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan pernyataan sekretaris lurah tompobalang Bapak suhardiman Utama.

“Mengenai aturan kita harus berdasarkan ketetapanannya perdanya Gowa.”(wawancara 3 April 2017)

Dan ditegaskan pula pernyataan Ketua Bidang Tata Ruang Kabupaten Gowa Ibu Iryani jamaluddin ST, MT.

“Dalam hal pelaksanaan penataan ruang di kawasan sempadan sungai kita selalu mengacu kepada perda Nomor 15 Tahun 2012.

Dari Hasil wawancara di atas sikap para pelaksana kebijakan dan dinas yang terkait telah menjalankan tugas dan fungsinya dan tak terlepas dari peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 .

3. Zonasi

Sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan agar perkembangan Kabupaten Gowa dapat terkendali sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa . salah satu langkah pengendalian adalah dengan adanya peraturan zonasi . dengn fungsi utama peraturan zonasi sebaga instrument pengendalian bangunan, pedoman penyusunan rencana operasional dan sebagai panduan teknis pengembangan dan pemanfaaaatan lahan.

4.5.2 Faktor Penghambat.

1. Koordinasi Antar Istansi Pemerintahan

Kordinasi antar instansi terkait merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan

sempadan sungai di Kabupaten Gowa, di harapkan agar koordinasi antar instansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sesuai pernyataan dari kepala bidang fisik dan prasarana (Bapedda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, Drs. Akhyani Saleh, S.Pi.

“Koordinasi itu yang perlu di tingkatkan antara balai pompengan dengan Bapedda Kabupaten Gowa. (wawancara 30 maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas, koordinas antar pihak yang terkait baik dari dinas (institusi) yang terkait dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jene berang kurang baik sesuai pernyataan dari kepala fisik dan prasarana Bappeda Kabupaten Gowa.

2. Kurangnya Pengawasan

Dari hasil observasi di lapangan berdirinya bangunan-bangunan permanen semi permanen , pabrik dan pembobolan tanggul yang mengalih fungsikan tanggul yang seharusnya tanggul sebagai penahan banjir di kawasan sempadan sungai sesuai pasal 4 peraturan menteri pekerjaan umum nomor 28 tahun 2015.

Sesuai pernyataan dari kepala bidang fisik dan prasarana (Bapedda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, Drs. Akhyani Saleh, S.Pi.”

"Memang itu rata-rata bagun-bangunan liar tapi karena pembiaran-pembiaran jadi permanen , sarannya sempadan bebas dari bagunan dan dijadikan RTH supaya tidak terkikis. Sepanjang sempadan sungai perlu di tingkatkan pengelolaan daerah aliran sungai karna kita ketahui sumber air sungguminasa meskipun ada bili-bili tapi yang masih utama ya sungai jeneberang." (wawancara 30 maret 2017).

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan maka pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan penataan ruang khususnya di kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik, dikarenakan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di sempadan sungai jeneberang. Dalam hal pengawasan pemerintah kurang mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai yang sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang yang di jelaskan pada peraturan daerah Nomor 15 tahun 2012 pada pasal 79 tentang ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai. kedua pemerintah tidak tegas terhadap sebagian masyarakat yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang. Ketiga kurangnya kordinasi antara pihak dan dinas yang terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten gowa.

5.2 Saran

Pemerintah daerah harus melakukan relokasi penduduk yang bermukim di kawasan sempadan sungai ke tempat yang layak. Kedua, pemerintah harus tegas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang. Dari segi kepentingan umum sungai jeneberang merupakan sumber air utama bagi masyarakat kabupaten gowa demi keberlanjutan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali, Faried dan Alam, Andi Syamsu. 2011. Studi Kebijakan Pemerintah ,Makassar: PT. Refika Aditama.

Arief, Hasrat, dkk.2014. *Pedoman penulisan proposal dan skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Abdullah, Syukur. 1985. Birokrasi dan Pembangunan Nasional : Studi Tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program Pembangunan di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.

Anggani, hening. 2005. *Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.

Agustinus, leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dwijowojoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo.

Hermit, herman.2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Bandung: Mandar Maju.

HR, Ridwan.2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

- Koesnadi,hardjasoemantri. 2009.*Hukum Tata Lingkungan*.Ed.7 cetakan ke-14. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Labolo, Muhadam.2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian teori konsep dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poedjioetami, Esty, 2008. Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai Dengan Menghadirkan Sentra Ekonomi Dan Rekreasi Kota. Institut Teknologi AdhiTama. Surabaya. Diakses pada 29 Desember 2016.
- Soekanto, soeryono,1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia , Jakarta: Press.
- Tjandra, W. Riawan.2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wahid, A.M.Yunus.2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Winarmo, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdullah. 1991. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.

Wahid, A.M. Yunus 1992, *peralihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang*. Makalah-lingkungan dan tata ruang, PPS UGM Yogyakarta.

Winarno, budi.2005. *Teori dan proses kebijakan public*.Yogyakarta: Media Pressindo.

Wahab, solihinabdullah .1997, *Analisis kebijakan*.Jakarta: Haji mas agung.

B. Perundang – Undangan :

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sepadan sungai.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

C. Website

(https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/sungai_fahmi.pdf) diakses pada tanggal 11/26/2016

(<http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>) diakses pada tanggal 2/7/2017

([http://istiarto.staff.ugm.ac.id/files/2011/01/Pengendalian-Banjir Sungai.pdf](http://istiarto.staff.ugm.ac.id/files/2011/01/Pengendalian-BanjirSungai.pdf)) diakses pada tanggal 2/15/2017

(<http://lorenskambuaya.blogspot.co.id/2012/10/bagian-bagian-sungai.html>) diakses pada tanggal 3/8/2017

- **LAMPIRAN PERATURAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2012-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan /atau dunia usaha;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)

20. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5188);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

28. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

29. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9.

Dengan
Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2012-2032

Kawasan Perlindungan
Setempat

Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang

ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya;

- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(2) huruf b, meliputi:

- a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan pada jenis-jenis sungai:

- a. Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk; dan
- b. Sungai-sungai yang bermuara ke lautan.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang, dan Sungai Pallappakang.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi dan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan

sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 125

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di
Sungguminasa pada
tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Di Undngkan di Sungguminasa

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBAR DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 1



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PRT/M/2015

TENTANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN
DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat diberi
wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola
serta mengembangkan kemanfaatan sumber air
dan/atau sumber-sumber air;

- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan garis sempadan sungai termasuk menetapkan garis sempadan danau.
- d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menetapkan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menyusun tata cara penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan
Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan
Danau;

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS
SEMPADAN DANAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

3. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
6. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) Km².

8. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
9. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
10. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
12. Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.
13. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

17. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.

18. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Menteri ini terdiri dari:

- a. penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata air;
- b. pemanfaatan daerah sempadan; dan
- c. pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.

BAB II

GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU Bagian

Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

(2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:

- a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
- c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Bagian Kedua

Kriteria Penetapan Garis Sempadan

Pasal 4

(1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:

- a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan f. mata air.

(3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 5

(1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter

Pasal 6

(1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km²; dan
- b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².

(2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

(3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 7

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 8

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 9

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir

Pasal 10

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 11

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 12

(1) Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak

50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

(2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau.

(3) Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Garis Sempadan

Pasal 13

Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai.

(2) Dalam penetapan garis sempadan sungai harus dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

(3) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.

(4) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

(5) Tim kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka

bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 16

Tatacara penetapan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penetapan garis sempadan danau dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. gubernur, danau yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan
- c. bupati/walikota, danau yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Penetapan garis sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan danau.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau.
- (3) Dalam hal danau berada di dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan.
- (4) Batas garis sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.

(5) Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.

Pasal 19

(1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur instansi teknis dan unsur masyarakat di sekitar atau sekeliling danau.

Pasal 20

(1) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

- a. prasarana sumber daya air;
- b. jalanakses, jembatan, dan dermaga;

- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
- f. prasarana dan sarana sanitasi; dan g. bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 21

Tatacara penetapan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 22

- (1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
- f. bangunan ketenagalistrikan.

(2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput;
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul

Pasal 23

(1) Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pariwisata;
- c. olah raga; dan/atau
- d. aktivitas budaya dan keagamaan.

3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
- f. prasarana dan sarana sanitasi; dan g. bangunan ketenagalistrikan.

(4) Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sempadan danau dilarang untuk:

- a. mengubah letak tepi danau;
- b. membuang limbah;
- c. menggembala ternak; dan
- d. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.

Pasal 24

(1) Pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan berdasarkan izin dari

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

BAB III

PENGAWASAN PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 25

(1) Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. seluruh izin pemanfaatan sempadan sungai atau izin pemanfaatan sempadan danau yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin;
- b. permohonan izin pemanfaatan sempadan sungai atau izin pemanfaatan sempadan danau yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap

ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau; dan

d. tim kajian sempadan sungai atau tim kajian sempadan danau yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa kerja tim kajian sempadan sungai atau tim kajian sempadan danau berakhir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara penetapan sempadan sungai dan sempadan danau mutatis mutandis berlaku ketentuan BAB II Peraturan Menteri ini untuk sungai dan danau yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,\

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 772

- Dokumentasi Penelitian di kawasan sempadan sungai jeneberang











Hasil wawancara Kepala bidang tata Ruang Kabupaten Gowa



Hasil Wawancara Kepala Fisik dan Prasarana (BAPPEDA)



Hasil Wawancara Kepala Penegakkan Peraturan Daerah (Satpol PP)



Hasil Wawancara Sekertaris Kecamatan Somba Opu



Hasil Wawancara Sekertaris Lurah Tompobalang



Hasil Wawancara Sekertaris Lurah Pandang-pandang



Hasil Wawancara Lurah Sungguminasa



Hasil Wawancara ibu rt 03 rw9 lingkungan tompobalang



Hasil Wawancara ketua Rt 02 Pandang-pandang



Hasil Wawancara tokoh masyarakat kelurahan Pandang-pandang



Surat undangan menghadiri rapat di kelurahan pandang-pandang

TEMANG
KELOMPOK LADAR TEMPAHAN SUNGAI HINERANG
KEL. PANDANG-PANDANG, KEC. SOMBA CPU, KAR. BOWA

No	Nama	Jabatan	Alamat	Kelurahan
1	Rahmanuddin, SE	Pembina	Kel.Pandang-Pandang	Latoh
2	Sufian Syam MARSIA	Pembina	Kel.Pandang-Pandang	Bamal
3	Dedi SINDA	Pembina	Kel.Pandang-Pandang	Sabima
4	Abul. Kadir Dg Fata	Pembina	Kel.Pandang-Pandang	Imam, Kel.Pandang-Pandang
5	Masrukingerti, SST, MM	Pembina	Kel.Pandang-Pandang	
6	H. Abul. Laili Mawo	Korwil/Kaggota	Ujung Mangrove	
7	Idawati	Sekretaris/Kaggota	Ujung Mangrove	
8	A. S. Suparno	Bendahara/Kaggota	Ujung Mangrove	
9	Achmad Luthi	Anggota	RT 1/RW 02 Pandang-Pandang	
10	M. Yusuf Dg Nuriati	Anggota	RT 1/RW 03 Pandang-Pandang	
11	Jamiatuddin Dg Jelling	Anggota	RT 1/RW 05 Mangrove	
12	Hasanuddin	Anggota	RT 1/RW 06 Mangrove	
13	Hasbiy	Anggota	RT 1/RW 07 Mangrove	
14	Abul. Halik Mawoed	Anggota	RT 1/RW 07 Mangrove	
15	Fatahvakil Dg Billa	Anggota	RT 1/RW 08 Mangrove	
16	Nurdi R. Dg Ngawinda	Anggota	RT 1/RW 08 Mangrove	
17	M. Yusuf Dg Hidayat	Anggota	RT 1/RW 07 Mangrove	
18	Amir Dg Mui	Anggota	RT 1/RW 08 Mangrove	



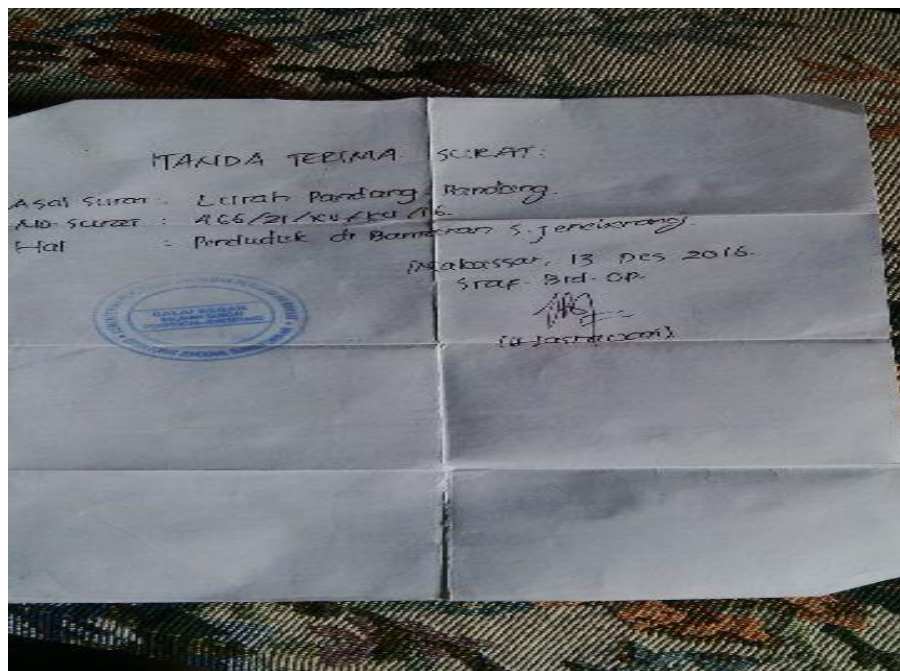
September 2016

09108 1-007

137



Sosialisasi pengelolaan sumber daya air di kelurahan pandang-pandang



Surat tebusan dari lurah pandang-pandang